

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Upaya pemberdayaan perempuan telah menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat global maupun nasional.<sup>1</sup> Konsep pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Organisasi internasional seperti UN Women dan UNDP menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam mengurangi ketidaksetaraan gender dan kemiskinan.<sup>2</sup> Di Indonesia, pemberdayaan perempuan menjadi prioritas dalam program pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Sosial (KemenSos) yang berupaya meningkatkan akses perempuan terhadap hak-hak dasar mereka.<sup>3</sup>

Namun, pemberdayaan perempuan seringkali terbatas pada pendekatan teknis yang lebih berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tanpa memperhatikan faktor sosial-ekonomi yang lebih kompleks.<sup>4</sup> Pendekatan ini cenderung mengabaikan faktor struktural yang memengaruhi kondisi perempuan, terutama perempuan marjinal di lingkungan perkotaan, seperti rumah susun. Padahal, ketidaksetaraan gender tidak hanya disebabkan oleh akses terhadap

---

<sup>1</sup> Y. S. Dewi, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (Women in Sustainable Development)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan* 12, no. 2 (2017): 61–64, <https://doi.org/10.21009/plpb.122.05>.

<sup>2</sup> United Nations Development Programme, *Human Development and Gender Equality Report* (UNDP, 2021).

<sup>3</sup> J. L. Febrian and N. I. Sagita, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan," *Journal of Governance Innovation* 5, no. 2 (2023): 345–69, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>.

<sup>4</sup> Mohammad Malikulhaq Al Farisi, "Implementasi Kebijakan Desa Digital Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital* 1, no. 1 (2023): 7, <https://doi.org/10.47134/jbkd.v1i1.1910>.

sumber daya semata, tetapi juga terkait dengan struktur kekuasaan yang mengakar di masyarakat.<sup>5</sup>

Marginalisasi dapat dilihat sebagai proses dinamis yang menempatkan perempuan dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, meminggirkan mereka dari peran penting di masyarakat, serta membatasi kontrol mereka dalam pengambilan keputusan penting.<sup>6</sup> Dalam sosial-ekonomi, marginalisasi sering kali terlihat pada kelompok minoritas yang secara struktural ditempatkan di posisi tidak menguntungkan.

Menurut Alakhunova (2015), terdapat empat pendekatan untuk mengidentifikasi kelompok termarginalisasi<sup>7</sup>: secara geometris (berdasarkan wilayah atau letak geografis), ekologis (kondisi lingkungan), ekonomi (potensi produktif dan kesenjangan aksesibilitas), dan sosial (berdasarkan kriteria seperti etnik, agama, dan bahasa).<sup>8</sup> Menurut Fakhri (2013)<sup>9</sup> Kelompok yang termarginal, termasuk perempuan, cenderung memiliki sedikit kontrol atas hidup mereka dan terbatas aksesnya terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak.<sup>10</sup> Mereka juga kerap menerima sikap negatif dari masyarakat, yang berkontribusi pada rendahnya kepercayaan diri serta harga diri mereka. Akibatnya, perempuan marginal sering kali terisolasi dari komunitas

---

<sup>5</sup> M. F. Iqbal and S. Harianto, "Prasangka, Ketidaksetaraan, Dan Diskriminasi Gender Dalam Kehidupan Mahasiswa Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 187–99, <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.52926>.

<sup>6</sup> A. F. Sahyana et al., "Marginalization of Women's Leadership in Politics and Government," *Progress in Social Development* 3, no. 2 (2022): 63–74, <https://doi.org/10.30872/psd.v3i2.46>; F. W. Gatzweiler, *Marginality: Addressing the Root Causes of Extreme Poverty* (Center for Development Research, 2011); A. H. Halsey, *Education, Economy, and Society* (Oxford University Press, 2015).

<sup>7</sup> N. Alakhunova et al., *Defining Marginalization: An Assessment Tool* (George Washington University & WFTO-Asia, 2015).

<sup>8</sup> Y. I. Safitri et al., "Pemberdayaan Komunitas Perempuan Marginal Dengan Pengenalan IMS Dan Upaya Deteksi Dini," *Community Development Journal* 4, no. 6 (2023): 12728–33.

<sup>9</sup> M. Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 2013).

<sup>10</sup> *Ibid*

mereka, semakin memperparah keterbatasan akses terhadap pemberdayaan sosial-ekonomi.<sup>11</sup>

Di Semarang, kelompok perempuan marjinal yang tinggal di Rumah Susun Bandarharjo menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Rumah susun ini merupakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi pilihan utama bagi keluarga marjinal di perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023), Rumah Susun Bandarharjo dihuni oleh lebih dari 4.200 jiwa, dengan 55% di antaranya adalah perempuan, yang sebagian besar adalah kepala keluarga atau ibu tunggal yang bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil, buruh kasar, atau pekerja domestik dengan penghasilan harian kurang dari Rp50.000. Perempuan-perempuan ini tidak hanya mengalami ketidakadilan ekonomi, tetapi juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dasar.<sup>12</sup>

Selain itu, minimnya fasilitas di rumah susun memperburuk situasi perempuan marjinal. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang (2023) mencatat bahwa fasilitas kesehatan hanya berupa puskesmas keliling yang datang dua kali dalam sepekan. Lebih dari 70% perempuan di Rumah Susun Bandarharjo melaporkan kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan reproduksi dan dasar (KemenPPPA, 2023). Keterbatasan ini berdampak pada kondisi kesehatan fisik dan mental perempuan, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Pemberdayaan perempuan di rumah susun harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan individu tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang lebih mendasar. Pemberdayaan yang efektif harus memungkinkan perempuan untuk

---

<sup>11</sup> L. Saptyawati and M. F. Filza, "Pemberdayaan Perempuan Marjinal Melalui Program Kewirausahaan Berbasis Bisnis Online BT - Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat," 2018.

<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Dan Anak Di Kota Semarang* (KemenPPPA, 2023).

terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.<sup>13</sup> Di sisi lain, Gramsci (1971) melalui teori kritisnya, mengungkapkan bahwa struktur kekuasaan yang ada sering kali memperkuat ketidaksetaraan dan perlu diubah untuk menciptakan pemberdayaan yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan dapat berperan lebih aktif dalam mendesain program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengkaji dinamika pemberdayaan perempuan di lingkungan perkotaan. Studi oleh NGO Women's Rights Watch (2023) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang berhasil biasanya melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan teknis tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok marjinal sering kali gagal mencapai tujuan yang diharapkan. Lembaga Penelitian Sosial Universitas Indonesia (2022) juga menemukan bahwa perempuan di perumahan sosial seperti rumah susun mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, serta memiliki keterbatasan modal untuk memulai usaha kecil.

Penelitian Rochmayanto & Kurniasih (2013) tentang perempuan petani di Solok menunjukkan bahwa perempuan sering menanggung beban ganda, yaitu menjadi pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga, terutama saat krisis ekonomi.<sup>15</sup> Hal yang sama ditemukan di Rumah Susun Bandarharjo berdasarkan wawancara dengan penduduk setempat. Perempuan di sana juga harus bekerja dan

---

<sup>13</sup> L. K. Alfirdaus et al., "Pemberdayaan Perempuan Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Di Desa Lerep, Kabupaten Semarang," *Jurnal Pengabdian Vokasi* 2, no. 1 (2021): 27.

<sup>14</sup> E. Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media* 5, no. 1 (2018): 11–33, <https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>.

<sup>15</sup> Yanto Rochmayanto and Pebriyanti Kurniasih, "PERANAN GENDER DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM PADA EKOSISTEM PEGUNUNGAN DI KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT ( The Role of Gender on Climate Change Adaptation in the Mountainous Ecosystem at Solok District , West Sumatera )," *Jurnal Analisa Kebijakan Kehutanan*, no. 1 (2013): 203–13.

mengurus rumah tangga, yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang ada belum memperhitungkan beban ganda ini.

Studi oleh UNDP (2021) di beberapa kota besar di Indonesia menemukan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dapat meningkatkan pendapatan hingga 20% dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Namun, program pemberdayaan yang ada sering kali hanya fokus pada keterampilan teknis, tanpa memperhatikan akses modal dan jaringan bisnis. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo.<sup>16</sup>

Kompleksitas pemberdayaan perempuan di Rumah Susun Bandarharjo tidak hanya terkait dengan akses ekonomi tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan kebijakan Kota Semarang yang ada. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Perempuan di Semarang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap hak-hak dasar, termasuk pendidikan dan ekonomi. Namun, implementasinya sering kali tidak optimal di lingkungan marginal seperti rumah susun.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo dapat dilakukan secara lebih inklusif dan efektif melalui kebijakan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi perempuan marginal, serta mengeksplorasi strategi pemberdayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai:

1. Apakah kebijakan yang ada cukup untuk menjadi landasan pemberdayaan kelompok perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo?

---

<sup>16</sup> Programme, *Human Development and Gender Equality Report*. (2021)

<sup>17</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Dan Anak Di Kota Semarang*. (2024)

2. Apa saja program pemberdayaan yang diimplementasikan pemerintah, dan bagaimana akses kelompok perempuan marginal terhadap program-program tersebut?
3. Apakah program-program pemberdayaan berimplikasi pada transformasi struktural kelompok perempuan marginal, ataukah sebaliknya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada dapat menjadi dasar pemberdayaan kelompok perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo.
2. Mengidentifikasi program-program pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan menganalisis akses perempuan marginal terhadap program tersebut.
3. Meneliti dampak program pemberdayaan terhadap transformasi struktural kelompok perempuan marginal, dengan melihat apakah program tersebut berhasil menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Penelitian ini Memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep pemberdayaan perempuan dalam sosial-ekonomi di lingkungan perkotaan, khususnya bagi perempuan yang tinggal di rumah susun.
2. Memperkaya literatur akademik mengenai tantangan struktural yang dihadapi perempuan marginal dalam program pemberdayaan, serta bagaimana peran kebijakan dapat mendukung pemberdayaan yang berkelanjutan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan program pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan marjinal.
2. Penelitian ini Menjadi acuan bagi lembaga atau organisasi non-pemerintah dalam merancang program pemberdayaan sosial-ekonomi bagi perempuan di kawasan perkotaan.

### 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tokan dalam penelitiannya “Model Pemberdayaan Perempuan Single Parent dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur” (2021) menemukan bahwa perempuan *single parent* menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi kemiskinan akibat struktur sosial dan budaya yang membatasi mereka. Dengan metode kualitatif yang mencakup wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan single parent di wilayah tersebut tidak hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk membangun jaringan sosial yang lebih kokoh. Temuan ini mendorong rekomendasi untuk pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan single parent melalui program-program yang mempertimbangkan gender dan inklusi ekonomi lokal. Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup-Perempuan (PKH-P)” yang dilakukan oleh Suhardi pada tahun 2019 menganalisis pemberdayaan perempuan marginal melalui program pelatihan keterampilan hidup yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.<sup>18</sup> Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi program pemberdayaan berbasis pelatihan, yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perempuan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku perempuan marginal yang mengikuti program ini,

---

<sup>18</sup> Suhardi, “Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup-Perempuan (PKH-P)” (STAIN Watampone, 2019).

terutama dalam aspek kemandirian ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian saya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan marginal dalam ranah sosial-ekonomi. Namun, penelitian ini memiliki kesenjangan karena tidak memperhatikan tantangan spesifik yang ada di lingkungan komunitas padat seperti rumah susun, di mana terdapat keterbatasan dalam fasilitas dan akses ekonomi.

Penelitian berjudul “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marginal (Pekerja Rumah Tangga) dalam Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19” yang dilakukan oleh Yuditia Nurimaniar dan Tony Yuri Rahmanto pada tahun 2022 menyoroti kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak ekonomi untuk kelompok perempuan marginal, khususnya pekerja rumah tangga, selama pandemi COVID-19. Dengan metode kualitatif yang menggunakan kerangka kerja Longwe, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya memberikan bantuan, keterbatasan dalam akses informasi dan partisipasi membuat upaya tersebut belum optimal bagi perempuan marginal. Penelitian ini sejalan dengan fokus saya pada pemberdayaan perempuan marginal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, gap yang ada dalam penelitian ini adalah ketidakmampuannya untuk menganalisa pemberdayaan di lingkungan perumahan urban padat seperti rumah susun, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi berbeda dan tantangan yang lebih kompleks. Selanjutnya Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif” oleh Abdurraafi’ Maududi Dermawan menyoroti sektor ekonomi kreatif sebagai solusi potensial bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperkenalkan 14 sektor ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan marginal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial mereka. Hasil penelitian ini mendukung penelitian saya dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi perempuan marginal. Namun, penelitian ini memiliki research gap karena tidak membahas kendala yang dihadapi perempuan marginal dalam mengakses peluang ekonomi kreatif di lingkungan

urban padat seperti rumah susun, di mana sumber daya sering kali terbatas.<sup>19</sup> Tidak hanya itu. Penelitian yang dilakukan oleh Yuditia Nurimaniar dan Tony Yuri Rahmanto pada tahun 2023 berjudul “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marginal dalam Pemenuhan Hak Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19” menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan pekerja rumah tangga dalam mengakses bantuan pemerintah selama pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kerangka Longwe untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses informasi mengurangi efektivitas bantuan, dan rekomendasi diberikan untuk kebijakan yang lebih adaptif. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian saya yang juga meneliti pemberdayaan perempuan marginal. Namun, research gap yang muncul adalah kurangnya kajian mengenai sebuah urban padat seperti rumah susun yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi unik dan tantangan tersendiri dalam akses terhadap bantuan ekonomi. Berikutnya, Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Tanjung Balai” oleh Muhammad Yafiz, Fatimah, dan Yusrizal pada tahun 2015 menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengamati pemberdayaan perempuan di sektor informal. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan di Tanjung Balai mampu memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka melalui usaha kerajinan tangan di sektor informal. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap tujuan penelitian saya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan marginal.<sup>20</sup> Akan tetapi, research gap yang ada adalah kurangnya kajian tentang pemberdayaan perempuan marginal di lingkungan urban padat seperti rumah susun, yang memiliki tantangan berbeda dalam hal fasilitas dan ruang untuk kegiatan ekonomi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad M. Dermawan, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif,” *Raheema* 3, no. 2 (2016): 45–58, <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i2.569>.

<sup>20</sup> Muhammad Yafiz et al., “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Balai” (Universitas Sumatera Utara, 2015).

<sup>21</sup> Y. Nurimaniar and T. Y. Rahmanto, *Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Kelompok Marginal (Pekerja Rumah Tangga) Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19* (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2022).

Selanjutnya Penelitian berjudul “Peran Pemberdayaan Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di PKBM Ngupoyo Ilmu Muncar Banyuwangi” oleh Achmad Tantowi, Hendra Setiawan, dan Nanik Yulianti pada tahun 2018 menggunakan metode kualitatif untuk meneliti dampak pelatihan keterampilan menjahit dalam meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>22</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan seperti menjahit, memasak dan membuat kue yang diperoleh perempuan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya dalam hal peningkatan ekonomi keluarga perempuan marginal. Namun, gap yang ada adalah tidak adanya kajian mengenai dukungan komunitas atau keterlibatan pemerintah dalam sebuah pemberdayaan perempuan di lingkungan urban padat seperti rumah susun. Penelitian berjudul “Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam” oleh Anifatus Solihah pada tahun 2016 menganalisis pemberdayaan perempuan di Desa Sokawera melalui industri rumahan bulu mata dari perspektif ekonomi Islam. Dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di industri rumahan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga. Penelitian ini mendukung penelitian saya dalam mengkaji peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Namun, research gap yang ada adalah kurangnya analisis tentang kondisi sosial-ekonomi di lingkungan urban padat seperti rumah susun.<sup>23</sup>

Kemudian, Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan” oleh Nika Risqi Fitriana pada tahun 2016 menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pemberdayaan perempuan melalui kelompok usaha bersama (KUB) di Desa Pulorejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga dan pemerintah memotivasi perempuan untuk mengembangkan usaha bersama dan

---

<sup>22</sup> Ahmad Tantowi et al., “Peran Pemberdayaan Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Di PKBM Ngupoyo Ilmu Muncar Banyuwangi” (Universitas Jember, 2018).

<sup>23</sup> A. Solihah, “Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya yang juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Namun, research gap-nya adalah kurangnya fokus pada urban padat dengan keterbatasan ruang untuk kegiatan ekonomi seperti yang ditemukan di rumah susun. Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan Marjinal melalui Program Kewirausahaan Berbasis Bisnis Online di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta” yang dilakukan oleh Laksmindra Saptyawati dan Muhammad Fairul Filza pada tahun 2018 menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dampak pelatihan kewirausahaan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi digital membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi perempuan marginal. Meskipun hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan saya, research gap-nya adalah kurangnya penerapan pemberdayaan di komunitas urban padat dengan keterbatasan akses ke teknologi dan ruang usaha. Berikutnya, Penelitian berjudul “Kebahagiaan dalam Perspektif Masyarakat Marginal” yang dilakukan oleh Lailul Ilham dan Ach. Farid pada tahun 2019 menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji konsep kebahagiaan di masyarakat marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pekerjaan dan penghasilan yang layak. Penelitian ini memberikan wawasan penting terkait kesejahteraan sosial, namun memiliki research gap karena tidak mengeksplorasi strategi pemberdayaan ekonomi yang terstruktur dalam urban padat seperti rumah susun.<sup>24</sup>

Kemudian, Penelitian berjudul “Konsep Pendidikan Anak Marginal dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat” oleh Meri Sandora pada tahun 2019 menggunakan studi literatur untuk mengkaji akses pendidikan bagi anak-anak marginal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak marginal sering kali tidak memperoleh pendidikan yang layak, menghambat perkembangan ekonomi mereka di masa depan. Penelitian ini relevan dalam bidang pemberdayaan

---

<sup>24</sup> L. Ilham and A. Farid, “Kebahagiaan Dalam Perspektif Masyarakat Marginal,” *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 2 (2019): 95–112.

komunitas marginal, tetapi research gap yang ada adalah kurangnya fokus pada keterampilan ekonomi untuk perempuan marginal di lingkungan urban padat. Penelitian berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok Wanita Tani dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Cindy Vatika Sari pada tahun 2021 menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas program pemberdayaan ekonomi wanita tani. Hasilnya menunjukkan bahwa dukungan ekonomi dan sosial meningkatkan keberhasilan pemberdayaan. Namun, gap yang muncul adalah kurangnya kajian mengenai sebuah pemberdayaan ekonomi di lingkungan urban padat. Tidak hanya itu, Penelitian berjudul “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin” oleh Rosmiyani pada tahun 2018 meneliti efektivitas program KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Metode kualitatif menunjukkan bahwa program KUBE memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Meskipun penelitian ini relevan untuk tujuan pemberdayaan, research gap-nya adalah tidak adanya kajian spesifik tentang tantangan perempuan di komunitas padat seperti rumah susun.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Penelitian berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” oleh Asti Prichatin pada tahun 2019 menemukan bahwa PKH sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Studi ini menunjukkan keberhasilan program sosial yang terstruktur dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi tidak mencakup rumah susun dengan tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Penelitian berjudul “Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif” oleh Abdurraafi Maududi pada tahun 2016 menyoroti ekonomi kreatif sebagai jalur

---

<sup>25</sup> M. Sandora, “Konsep Pendidikan Anak Marginal Dalam Perspektif Pendidikan Berbasis Masyarakat,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2019): 196–216, <https://doi.org/10.24014/Marwah.v18i2.7588>.

untuk mendukung kemandirian perempuan.<sup>26</sup> Meskipun ekonomi kreatif menyediakan peluang bagi perempuan, penelitian ini memiliki gap dalam perumahan urban padat dengan keterbatasan akses ekonomi. Penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Mappadeceng di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng” oleh Cindy Vatika Sari pada tahun 2021 menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi menghambat keberhasilan program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi, namun gap yang ada adalah kurangnya fokus pada tantangan urban padat dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian “Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Perspektif Ekonomi Islam” oleh Rosmiyani (2018) menyoroti aspek keadilan dalam efektivitas program KUBE. Namun, penelitian ini memiliki gap karena tidak membahas tantangan pemberdayaan ekonomi dalam perumahan padat seperti rumah susun yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi unik.<sup>27</sup>

Kemudian dalam Penelitian berjudul “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ramah Gender” yang dilakukan oleh Elittaria Ginting dan Hagawaomasi Zokho Sihura berfokus pada perbandingan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang UMKM antara Kota Surabaya dan Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk menganalisis peran pemimpin perempuan di dua kota tersebut, khususnya melalui inovasi kebijakan yang didorong oleh wali kota masing-masing. Surabaya dipimpin oleh Tri Rismaharini, yang dikenal karena upayanya dalam mengembangkan inovasi sosial dan program berbasis ekonomi kreatif, sementara Probolinggo dipimpin oleh Puput Tantriana Sari, yang juga memanfaatkan UMKM untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Hasil

---

<sup>26</sup> Sari Lestari Zainal Ridho et al., “The Community Participation in Tourism Sustainability and Tourist Satisfaction,” *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events* 5, no. 1 (2021): 53–63, <https://doi.org/10.31940/ijaste.v5i1.2115>.

<sup>27</sup> A. Prichatin, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” (UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019).

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM telah membantu perempuan di kedua kota untuk lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan akses mereka ke sumber daya dan kesempatan kerja. Inovasi dalam kepemimpinan perempuan tersebut dianggap berperan penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya yang berjudul “Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Perempuan Marjinal: Studi Kasus Rumah Susun Bandarharjo” karena keduanya berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui kebijakan yang ramah gender dan dukungan komunitas lokal. Akan tetapi, research gap yang terlihat adalah bahwa penelitian ini tidak membahas penerapan kebijakan pemberdayaan di lingkungan perumahan padat seperti rumah susun, yang memiliki dinamika sosial-ekonomi berbeda. Di rumah susun, tantangan seperti keterbatasan ruang untuk kegiatan usaha, akses yang terbatas ke pelatihan kewirausahaan, dan kurangnya dukungan infrastruktur ekonomi menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, pendekatan kebijakan di rumah susun perlu lebih spesifik dalam menangani kebutuhan sosial-ekonomi dan membangun jaringan pendukung yang dapat mendorong pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian saya berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada spesifikasi permasalahan baru.

Terakhir, penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Wanita sebagai Ibu Keluarga dan Perannya di Ranah Publik (Studi Kasus di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk)” oleh Nandipah Roazah (2024) mengkaji bagaimana perempuan di Desa Ngliman menjalankan peran ganda sebagai ibu dan sebagai anggota aktif dalam masyarakat. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis data seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman perempuan dalam menjalankan peran rumah tangga serta keterlibatan mereka di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di desa ini masih sangat terikat dengan norma-norma tradisional yang

menetapkan peran mereka sebagai ibu rumah tangga dan pendukung suami dalam pekerjaan pertanian. Walau demikian, ada beberapa perempuan yang menunjukkan inisiatif dengan terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi, seperti berdagang di objek wisata lokal, yang membantu menambah pendapatan keluarga. Penelitian ini memberikan pandangan yang relevan dengan penelitian saya karena menggambarkan bagaimana perempuan memanfaatkan keterampilan dan peluang yang ada di lingkungan mereka untuk mendukung ekonomi keluarga. Namun, research gap yang ada adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada pedesaan dengan budaya tradisional yang kental, tanpa memperhatikan tantangan yang ada di lingkungan perumahan urban padat seperti rumah susun. Di rumah susun, perempuan tidak hanya menghadapi batasan budaya, tetapi juga keterbatasan ruang, fasilitas, dan peluang untuk berkembang di ranah ekonomi. Tantangan ini membuat pemberdayaan perempuan di rumah susun menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama dalam hal dukungan kebijakan lokal dan fasilitas untuk berwirausaha. Penelitian saya berupaya mengisi gap tersebut dengan fokus pada upaya pemberdayaan yang spesifik untuk perempuan di rumah susun, serta bagaimana mereka dapat terlibat aktif dalam ranah sosial ekonomi dengan dukungan dari lingkungan dan kebijakan yang sesuai<sup>28</sup>

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1 Marjinalisasi**

Marginalisasi adalah proses sosial yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu mengalami keterpinggiran dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Kondisi ini muncul akibat dominasi kelompok yang lebih kuat, sehingga kelompok rentan kehilangan akses dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Roazah, N. (2024). Peran Wanita sebagai Ibu Keluarga dan Perannya di Ranah Publik (Studi Kasus di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 99-113. DOI:10.62383/konsatitusi.v1i4.173

<sup>29</sup> Janice E. Perlman, *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro* (University of California Press, 1976); Anthony Giddens, *The Third Way: The Renewal of*

Marginalisasi ini biasanya mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh sumber daya, akses pendidikan, pekerjaan layak, serta dukungan sosial-politik. Akibatnya, mereka sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keterbelakangan, bahkan aktivitas menyimpang sebagai strategi bertahan hidup. Sehingga marginalisasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan kultural.

Dalam konteks global, perempuan marjinal menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan karena mereka merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pengecualian. Marginalisasi perempuan dapat dipahami sebagai proses sosial di mana perempuan secara sistematis dikecualikan dari akses sumber daya, peluang, serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini tidak sekadar insidental, melainkan berakar pada ketidaksetaraan struktural, prasangka budaya, dan hambatan kelembagaan.

Menurut Nigam (2014), posisi perempuan marjinal dapat diidentifikasi melalui empat indikator utama<sup>30</sup>:

1. Eksploitasi: perempuan sering terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah atau peran domestik yang tidak diakui.
2. Kerentanan: risiko tinggi terhadap kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi berlapis.
3. Akses ke Sumber Daya: keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, kredit, tanah, maupun pekerjaan layak.
4. Representasi: minimnya keterlibatan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan publik.

Keempat indikator ini saling terkait, eksploitasi memperbesar kerentanan, kurangnya akses dan representasi membuat perempuan sulit melawan

---

*Social Democracy* (Polity Press, 1998); Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy* (Oxford University Press, 2000); Pete Alcock, *Understanding Poverty* (Macmillan, 1993).

<sup>30</sup> Aditya Nigam, *Power and Contestation: India Since 1989* (Oxford University Press, 2014).

ketidakadilan. Sebaliknya, peningkatan akses dan representasi mampu mengurangi kerentanan dan eksploitasi.

Kerentanan perempuan marginal bersifat multidimensional. Menurut Shrirang, faktor politik, ekonomi, agama, ketidaktahuan, dan rasa takut memperburuk posisi perempuan. Kerentanan tidak hanya bersumber dari identitas gender, tetapi juga berlapis dengan faktor lain seperti etnis, lokasi geografis, keterbatasan ekonomi, hingga identitas seksual.

Sementara itu, Gatzweiler (2011) merinci akar keterbatasan akses perempuan marginal ke dalam empat bentuk:<sup>31</sup>

1. Pengecualian (Exclusion): dikeluarkan dari pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
2. Diskriminasi (Discrimination): perlakuan tidak setara berbasis gender, etnis, atau agama.
3. Pembatasan Akses (Restriction): hambatan terhadap kepemilikan tanah, kredit, pasar, atau teknologi.
4. Kombinasi Faktor: marginalisasi muncul dari akumulasi faktor keluarga, ekonomi, gender, etnis, agama, serta infrastruktur.

Dengan melihat marginalisasi sebagai proses multidimensional yang menyingkirkan perempuan dari akses sumber daya dan representasi, maka kajian pemberdayaan menjadi penting sebagai strategi untuk mengatasi keterpinggiran tersebut.

### **1.6.2 Pemberdayaan**

Secara etimologis, istilah *pemberdayaan* berasal dari kata dasar *daya* yang berarti kemampuan. Dan pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses yang mendorong individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan hidup serta meningkatkan daya saing dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks perempuan, pemberdayaan berarti usaha

---

<sup>31</sup> Gatzweiler, *Marginality: Addressing the Root Causes of Extreme Poverty*.

memperkuat posisi mereka supaya mampu mengendalikan kehidupannya sendiri, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan. Pemberdayaan terutama perlu diarahkan kepada kelompok perempuan yang selama ini berada dalam posisi tertinggal atau termarjinalkan.

Dalam memahami pemberdayaan, peneliti menggunakan perspektif *feminist economics*. Irene van Staveren (2001) menegaskan bahwa *Feminist Economics* bukan sekadar koreksi atas bias gender, tetapi juga tawaran *alternatif paradigma* yang mengakui kontribusi kerja domestik dan *care economy*.<sup>32</sup> Pendekatan ini mengkritisi cara pandang ekonomi konvensional yang kerap mengabaikan kontribusi perempuan di ranah domestic terutama kerja tidak dibayar (*unpaid work*) dan *care economy*. Padahal, aktivitas-aktivitas tersebut sangat menentukan keberlangsungan sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan kata lain, *feminist economics* tidak hanya menyoroti keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya, tetapi juga menekankan perlunya redistribusi, pengakuan atas kerja reproduktif, serta kebijakan publik yang inklusif gender.

UN Women (2021) mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai upaya meningkatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan penting di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pekerjaan.<sup>33</sup> Definisi ini menegaskan bahwa pemberdayaan bukan sekadar memberikan akses, melainkan juga memastikan kesetaraan kesempatan sehingga perempuan benar-benar dapat berpartisipasi penuh dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Sri Marwanti (2012), pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu *capacity building*, *cultural change*, dan *structural*

---

<sup>32</sup> Irene van Staveren, *The Values of Economics: An Aristotelian Perspective* (Routledge, 2001).

<sup>33</sup> UN Women, *The Big Conversation: Handbook to Address Violence Against Women in and Through the Media* (2021).

change. Ketiga indikator ini saling berkaitan dan mencerminkan proses peningkatan posisi perempuan baik pada level individu maupun sosial.

a. *Capacity building* (pengembangan kemampuan perempuan)

Indikator ini berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya perempuan untuk meningkatkan agensi dan kemandirian mereka. Program yang dirancang berdasarkan kerangka kerja ini bertujuan untuk membekali perempuan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, pelatihan kejuruan dan lokakarya literasi keuangan memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi. Dengan memperkuat kapasitas individu dan kolektif perempuan, inisiatif semacam itu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berkontribusi secara berarti bagi masyarakat.

b. *Cultural change* (perubahan budaya yang mendukung perempuan)

Praktik dan stereotip budaya yang mengakar kuat sering kali menghambat kemajuan perempuan, sehingga memerlukan upaya untuk menantang dan membentuk kembali sikap ini. Kampanye kesadaran publik merupakan alat yang ampuh untuk menghilangkan stereotip gender, mempromosikan tanggung jawab domestik bersama, dan merayakan pencapaian perempuan di berbagai bidang. Selain itu, melibatkan laki-laki dan anak laki-laki dalam dialog komunitas dapat lebih jauh menantang praktik-praktik patriarki, seperti pernikahan dini atau sistem warisan yang diskriminatif. Acara-acara budaya yang menghargai kontribusi perempuan terhadap sejarah, seni, dan inovasi juga berfungsi untuk meningkatkan status mereka di masyarakat. Transformasi budaya semacam itu penting untuk menghilangkan hambatan sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan gender.

c. *Structural adjustment* (penyesuaian struktural yang berpihak pada perempuan)

Penyesuaian struktural menangani perubahan kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pemberdayaan perempuan. Hal ini termasuk merevisi undang-undang, kebijakan, dan praktik kelembagaan yang ada untuk memastikannya inklusif dan adil.

Penganggaran yang responsif gender, misalnya, memastikan bahwa dana publik dialokasikan untuk program-program yang menangani kebutuhan khusus perempuan, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan. Kebijakan tempat kerja yang mewajibkan upah yang setara, perlindungan anti-pelecehan, dan kuota bagi perempuan dalam peran kepemimpinan sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam lingkungan profesional.

Ketiga indikator tersebut sejalan dengan kerangka *feminist economics*, *capacity building* berhubungan dengan penguatan modal manusia perempuan, *cultural change* dengan pengakuan terhadap nilai kerja domestik dan sosial, serta *structural adjustment* dengan redistribusi sumber daya dan penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil gender.

Namun, dalam praktiknya, pemberdayaan perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek. Pertama, hambatan struktural, berupa kebijakan diskriminatif dan sistem hukum yang bias gender sehingga membatasi akses perempuan pada pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Kedua, hambatan budaya, yaitu nilai-nilai patriarki yang melanggengkan stereotip dan praktik merugikan, seperti pernikahan dini atau kekerasan berbasis gender. Ketiga, hambatan ekonomi, di mana perempuan marjinal kerap terjebak dalam pekerjaan informal bergaji rendah, minim akses terhadap kredit, serta rentan terhadap kemiskinan. Keempat, hambatan politik, yang tercermin dari rendahnya representasi perempuan dalam lembaga politik dan pengambilan keputusan, sehingga suara mereka sering kali tidak terakomodasi. Karena itu, pemberdayaan perempuan tidak cukup jika hanya berupa bantuan sesaat. Lebih dari itu, diperlukan perubahan struktural, pengakuan terhadap kerja perempuan, serta jaminan akses setara di berbagai aspek kehidupan.

### **1.6.3 *Feminist Approach***

*Feminist approach* merupakan kerangka kritis yang memahami ketidaksetaraan gender bukan semata-mata persoalan individu, melainkan hasil dari struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang timpang. Pendekatan ini menantang distribusi kuasa yang tidak seimbang dan memperjuangkan keadilan

substantif bagi kelompok perempuan, terutama mereka yang berada pada posisi marginal.

Rowan Harvey menekankan bahwa feminist approach dibangun atas tiga prinsip utama. Pertama, komitmen eksplisit terhadap kesetaraan gender yang disertai analisis relasi kuasa, sehingga pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian akses formal, melainkan juga mengubah struktur yang mengekalkan ketidaksetaraan.<sup>34</sup> Kedua, analisis interseksional yang melihat kerentanan perempuan sebagai hasil dari lapisan identitas seperti kelas sosial, etnis, agama, usia, dan status pernikahan yang saling memperkuat. Ketiga, penguatan organisasi kolektif perempuan, karena transformasi jangka panjang hanya dapat dicapai melalui solidaritas yang memungkinkan perempuan marginal memperjuangkan kepentingan bersama.

Martha Nussbaum melalui *capability approach* menekankan pentingnya membedakan antara akses formal dan kemampuan nyata (*real capabilities*).<sup>35</sup> Bagi Nussbaum, pemberdayaan sejati bukan sekadar apakah perempuan diperbolehkan bersekolah atau bekerja, melainkan apakah mereka benar-benar mampu memanfaatkan hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, capaian pemberdayaan harus diukur dari kebebasan substantif yang dimiliki perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.

Sylvia Walby menegaskan bahwa ketidaksetaraan gender bersumber dari sistem patriarki yang beroperasi melalui enam struktur: domestik, pekerjaan berupah, negara, kekerasan, seksualitas, dan budaya.<sup>36</sup> Keterbatasan akses perempuan marginal tidak dapat dipandang sebagai kegagalan individu, melainkan akibat cara kerja patriarki yang membatasi ruang gerak mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>34</sup> Rowan Harvey, *A Feminist Approach to Development* (Oxfam International, 2020).

<sup>35</sup> Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development: The Capabilities Approach* (Cambridge University Press, 2000).

<sup>36</sup> Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (Basil Blackwell, 1990).

Dari ketiga perspektif tersebut dapat dipahami bahwa feminist approach memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam dalam melihat kondisi perempuan marjinal. Harvey menunjukkan adanya kerentanan berlapis dan pentingnya kekuatan kolektif, Nussbaum menekankan kebebasan substantif sebagai ukuran keberhasilan pemberdayaan, sementara Walby mengungkap akar struktural dari keterbatasan akses yang dialami perempuan. Feminist approach tidak hanya membantu membaca situasi yang dihadapi perempuan marjinal, tetapi juga memberikan dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan dan program benar-benar mampu menciptakan perubahan yang substantif dan struktural.

### 1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kebijakan yang ada di Rumah Susun Bandarharjo cukup sebagai landasan pemberdayaan kelompok perempuan marjinal, program pemberdayaan yang diimplementasikan pemerintah serta komunitas seperti pelatihan kewirausahaan sentra boga dan kriya, inisiatif *urban farming* di lahan terbatas, integrasi pemasaran UMKM, lokakarya kesehatan reproduksi dan konseling anti-kekerasan domestik, akan dinilai efektifitas dan akses kelompok perempuan marjinal terhadap program-program tersebut dan apakah program-program pemberdayaan tersebut berimplikasi pada transformasi struktural kelompok perempuan marjinal, ataukah sebaliknya, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kondisi perempuan di rumah susun bandarharjo.

Tabel 1. 1 Operasional Konsep

Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Indikator
----------	-----------------	----------------------	-----------

---

<p><b>Marjinalisasi</b> (Perlman, 1976; Giddens, 1998; Nigam, 2014; Gatzweiler, 2011)</p>	<p>Proses sosial-ekonomi yang menyingkirkan kelompok tertentu ke posisi pinggiran, sehingga terbatas aksesnya terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan.</p>	<p>Marginalisasi dioperasionalkan sebagai kondisi keterpinggiran perempuan marginal di Bandarharjo yang ditandai dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dijamin dalam Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Fokus penelitian adalah mengukur sejauh mana perempuan marginal benar-benar bisa mengakses hak-hak tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses Pendidikan</li> <li>2. Akses Kesehatan</li> <li>3. Akses Ekonomi</li> <li>4. Akses Pekerjaan Layak</li> <li>5. Akses Partisipasi Sosial-Politik</li> </ol>
<hr/>			
<p><b>Pemberdayaan Perempuan</b> (UN Women, 2021; Sri Marwanti, 2012; Feminist Economics)</p>	<p>Proses peningkatan kapasitas, akses, kontrol, dan partisipasi perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri serta memengaruhi perubahan sosial-ekonomi.</p>	<p>Upaya program dan kebijakan di Rusun Bandarharjo yang memberi peluang perempuan marjinal meningkatkan keterampilan, mengakses sumber daya, serta memperoleh dukungan sosial dan kelembagaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>capacity building</i></li> <li>2. <i>cultural change</i></li> <li>3. <i>structural adjustment</i></li> </ol>

---

---

<b>Feminist Approach</b> (Harvey, 2020; Nussbaum, 2000; Walby, 1990)	Perspektif analisis yang menekankan relasi kuasa berbasis gender, interseksionalitas, dan pentingnya transformasi struktural menuju kesetaraan substantif.	Kerangka analisis kritis untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo berimplikasi pada perubahan struktural. Dimana ketidaksetaraan gender bukanlah kegagalan individu, melainkan hasil dari struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang timpang. Oleh karena itu, pemberdayaan akan diukur bukan hanya dari pemberian akses formal, tetapi dari transformasi relasi kuasa, kebebasan substantif, dan pergeseran sistem patriarki.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transformasi relasi kuasa dan kolektivitas perempuan (Harvey).</li> <li>2. Kebebasan substantif dan kemampuan nyata (Nussbaum).</li> <li>3. Perubahan struktur patriarki dalam enam ranah kehidupan (Walby).</li> </ol>
---	--	--	---

---

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Definisi penelitian pendekatan kualitatif didasarkan pada filosofi post-positivis

yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari keadaan objek-objek alam utama (bukan eksperimen).<sup>37</sup> Sarana meliputi pengambilan sampel data yang ditargetkan dari sumber data. Metode survei menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan kualitatif berarti bukan generalisasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. Mereka menunjukkan bahwa positivisme itu sangat bermasalah, karena pandangannya adalah bagaimana penerapan metode ilmu-ilmu alam pada ilmu-ilmu sosial tak lain dari saintisme dan ideologi, bahkan pendekatan kritis menilai positivisme hanya meng”kontemplasikan” masyarakat, positivisme melestarikan status quo konfigurasi masyarakat yang ada.<sup>38</sup> Pada penelitian ini setiap penelitian harus memperoleh pengetahuan tentang *das sein* (apa yang ada) dan bukan *das sollen* (apa yang seharusnya ada). Sehingga yang terjadi pengetahuan tidak mendorong pada perubahan yang lebih baik, namun hanya menyalin data sosial tersebut.

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Rumah Susun Bandarharjo, Semarang, yang merupakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemilihan situs ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang (2023), yang menunjukkan bahwa mayoritas penghuni rumah susun adalah perempuan yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Situasi ini membuat perempuan di rumah susun lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada karakteristik masyarakat di rumah susun, yang menghadapi tantangan yang kompleks dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2021).

<sup>38</sup> F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche* (Gramedia, 2007).

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dijelaskan sebagai tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh.<sup>39</sup> Penelitian ini akan melibatkan perempuan yang tinggal di Rumah Susun Bandarharjo, yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja domestik. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang beragam dari sisi latar belakang sosial, usia, pekerjaan, dan status ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga atau instansi pemerintahan yang fokus pada pemberdayaan perempuan marjinal di Bandarharjo, Kota Semarang. Perwakilan pemerintah daerah setempat, komunitas serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam program pemberdayaan di rumah susun di Bandarharjo. Diharapkan aktor aktor diatas dapat memberikan wawasan dan mendukung kelancaran penelitian ini, dengan berbagi informasi melalui observasi lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti, terkait dengan fokus utama penelitian ini yaitu ‘Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan Marjinal: Studi Kasus di Rumah Susun Bandarharjo.

### 1.8.4 Jenis dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan sumber yakni:

Tabel 1. 2 Daftar Subjek Wawancara

No	Informan	Posisi	Afiliasi
1.	Primasari Yuswardani Suryaningtyas, SH,MM.	Ketua Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Kota Semarang
2.	Gilang Pangaribowo S.E	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

---

<sup>39</sup> S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. (Rineka Cipta, 2010).

3.	Faishal Lanang Bayu Perkasa S.STP	Analisis Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
4.	Ruhudini S.H	Sub Koordinator PUG	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
5.	Wiwik Candra Wulandari	Pekerja Sosial Masyarakat	Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang
6.	Dhany Ade Asmara, SE, MM.	Kesejahteraan Sodsial	Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang
7.	Nadya	Pembina GOW Kota Semarang	UPTD PPA Kota Semarang
8.	Astuti	Kepala Bidang Perekonomian Permata Hebat Kota Semarang	UPTD PPA Kota Semarang
9.	Ikke	Kader PKK Rumah Susun Bandarharjo	Rumah Susun Bandarharjo
10.	Hasta Budi	Ketua RW 12, Rumah Susun Bandarharjo	Rumah Susun Bandarharjo
11.	Nisiyah	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 01	Rumah Susun Bandarharjo
12.	Pujiati	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 02	Rumah Susun Bandarharjo
13.	Sri Hartati	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 03	Rumah Susun Bandarharjo
14.	Putri	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 04	Rumah Susun Bandarharjo
15.	Wiwit	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 05	Rumah Susun Bandarharjo
16.	Siti	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 06	Rumah Susun Bandarharjo
17.	Tari Sugeng	Perempuan Penghuni Rumah Susun Bandarharjo RT 07	Rumah Susun Bandarharjo

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada (Hasan, 2002).<sup>40</sup> Data yang di dapatkan tidak diperoleh langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai sumber seperti dokumen kebijakan, laporan pemerintah, data statistik, artikel, jurnal, dan laporan dari LSM. Data ini membantu memperluas analisis dan mendukung hasil dari data primer.

### 1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data tersebut. Djaman Satori dan Aan Komariah (2011). Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan pada objek maupun subjek penelitian. Menurut Hasan (2002).<sup>41</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi nyata perempuan yang tinggal di rumah susun Bandarharjo. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perempuan-perempuan tersebut menghadapi berbagai masalah sosial dan ekonomi, serta peran mereka dalam kegiatan atau program pemerintah. Peneliti mencatat secara langsung pola-pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, serta akses perempuan terhadap layanan dasar yang ada di rumah susun.

#### 3. Wawancara

Ialah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden, dan dilakukan pencatatan atas jawaban responden tersebut.<sup>42</sup> Wawancara pada penelitian ini metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap relevan dengan penelitian.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

#### 4. Dokumentasi

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>43</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan berbagai jenis dokumen, seperti laporan, kliping, data digital, foto, video dan surat-surat yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan berbagai konsep yang akan dipakai sebagai pedoman dalam penelitian adalah dengan menggunakan pencarian data menggunakan metode studi pustaka. Peneliti akan mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

### **1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang tidak bisa diubah menjadi angka atau data statistik. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan informasi yang telah terkumpul secara logis dan sistematis. Proses ini bertujuan untuk memetakan data ke dalam pola-pola tertentu. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Data tersebut berasal dari wawancara, observasi, dokumen resmi, catatan pribadi, berita, artikel online, jurnal penelitian, foto, dan lainnya.

#### 2. Reduksi Data

---

<sup>43</sup> Prof. Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (2012).

Mereduksi data dapat diartikan sebagai menyingkat data-data yang telah diperoleh sebelumnya, memilih informasi-informasi penting, memfokuskan kepada hal-hal penting, serta dicari pola dan temanya. Sehingga data hasil reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti dalam menulis kesimpulan.<sup>44</sup> Pada penelitian ini, peneliti penyaringan data yang sudah dikumpulkan. Peneliti akan membuat rangkuman inti dari informasi yang penting dan relevan dengan fokus penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyederhanakan data agar lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Penyajian Data

Langkah berikutnya yang dilakukan setelah data diperoleh adalah menyajikan data hasil penelitian. Penyajian data akan membantu untuk mendalami apa yang terjadi serta menyusun langkah kerja berikutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>45</sup> Peneliti melakukan data tahap pengorganisasian data yang sudah disaring agar lebih mudah dipahami. Data disusun dalam kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan tema atau pembahasan penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat melihat hubungan antar data dengan lebih jelas.

### 4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Tahapan akhir dari pengolahan data ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat tidak tetap dan akan berubah bila tidak dijumpai bukti yang menuatkan pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2017).<sup>46</sup> Tahap ini peneliti mencari pola, tema, atau hubungan tertentu dari data yang ada. Jika diperlukan, data baru dapat dikumpulkan untuk memverifikasi hasil analisis. Keputusan yang diambil pada akhirnya akan menjadi

---

<sup>44</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2017).

<sup>46</sup> *Ibid*

jawaban atas masalah penelitian mengenai pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan marginal di rumah susun Bandarharjo.

## **1.9 Sistematika Penelitian**

### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian berdasarkan kesenjangan antara kondisi empiris (das sein) dan kondisi ideal (das sollen). Selanjutnya disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga memuat kajian penelitian terdahulu beserta argumentasi kebaruan penelitian, kerangka teoretis yang relevan, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian kualitatif kritis, subjek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data

### **BAB II Gambaran Umum Lokasi dan Konteks Penelitian**

Bab ini menyajikan gambaran umum Kota Semarang, khususnya kondisi demografis perempuan dan kelompok perempuan marginal. Uraian difokuskan pada karakteristik sosial dan ekonomi perempuan marginal, termasuk profil perempuan marginal di kawasan Rumah Susun Bandarharjo. Selain itu, dibahas kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan marginal sebagai konteks kebijakan penelitian.

### **BAB III Temuan Penelitian**

Bab ini memaparkan temuan penelitian mengenai kebijakan dan program pemberdayaan perempuan marginal di Rumah Susun Bandarharjo, Kota Semarang. Pembahasan mencakup implementasi program, tingkat aksesibilitas perempuan marginal, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu, dianalisis dampak sosial dan ekonomi program terhadap kehidupan perempuan marginal.

### **BAB IV Pembahasan**

Bab ini membahas dan menganalisis temuan penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka teoretis dan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan perempuan

marjinal, keberlanjutan dampak yang dihasilkan, serta kontribusi penelitian ini dalam memberikan perspektif kritis terhadap praktik pemberdayaan perempuan di tingkat lokal.

#### BAB V Penutup

Bab ini menyajikan simpulan penelitian yang merangkum temuan utama dan menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, disampaikan rekomendasi kebijakan dan program pemberdayaan perempuan marjinal, implikasi teoretis dan praktis penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.